



Garis Sipil yang Digeser

Catatan atas Dua Tahun Prabowo-Gibran

Jaleswari Pramodhawardani

Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45)

The Indonesian Forum Seri ke-137
The Indonesian Institute • Kamis, 22 Oktober 2026

Tiga Lapis Uji

1

Arah

Apa yang dirancang

2

Implementasi

Bagaimana dijalankan

← Di lapis inilah evaluasi biasanya berhenti

3

Konfigurasi

Siapa diuntungkan, ke mana akuntabilitas mengalir

***“Masalahnya bukan di pelaksanaan.
Masalahnya di arah.”***

Garis yang Digeser: Tiga Jalur



Legislasi

Revisi UU TNI memperluas jabatan sipil bagi prajurit aktif. Perpres 66/2025 melibatkan TNI dalam perlindungan jaksa.



Teritorial

204 satuan baru TNI diresmikan 5 Oktober 2026, termasuk 6 Kodam dan 150 Yonif TP. Target: 750 batalyon pada 2029.



Kesejahteraan

MBG, Koperasi Desa Merah Putih, food estate, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

“Supremasi sipil tidak dirobuhkan. Ia dicicil.”

Lewat Pintu Dapur Kesejahteraan

Welfare militarism

Perluasan peran militer yang dilegitimasi bukan oleh ancaman, tetapi oleh penyaluran kesejahteraan.

Ketika program sosial dijalankan lewat rantai komando, warga yang dirugikan tidak bisa mengadu ke DPRD atau Ombudsman secara efektif.



50.059

korban keracunan MBG, data surveilans Kemenkes dalam laporan TII



5 meninggal

dari puluhan ribu calon manajer Kopdes yang dikirim ke latihan dasar militer



Food estate

pangan diurus lewat satuan teritorial



Satgas PKH

penertiban kawasan hutan dengan pelibatan TNI

Dari Pagar Menjadi Alat

13 Nov 2025

**Putusan MK
114/PUU-
XXIII/2025**

Polisi aktif dilarang
menduduki jabatan sipil



10 Des 2025

**Perpol 10/2025
diundangkan**

Polisi aktif dibuka masuk ke
17 kementerian dan
lembaga

17

kementerian dan lembaga terbuka
bagi polisi aktif, sebulan setelah
putusan MK

“Institusi yang paling banyak diadukan justru yang paling cepat diperluas kewenangannya.”

Ruang Sipil yang Menyempit

56/100

Freedom House 2026

Status Partly Free

3.195

orang ditangkap

25–31 Agustus 2025, data Polri
sendiri

663 → 752

pengaduan terhadap Polri

ke Komnas HAM, 2024–2025
(laporan TII)

“Pengaduan adalah termometer kepercayaan warga.”

***“Bukan penyimpangan baru,
melainkan warisan yang dilanjutkan
tanpa koreksi.”***



Andrie Yunus: Impunitas yang Dirancang



12 Mar 2026

Disiram air keras oleh empat personel BAIS TNI



10 Jun 2026

Pengadilan Militer: 1,5–3 tahun, dua dipecat



20 Agu 2026

Banding: hukuman dua prajurit dipangkas, pemecatan batal



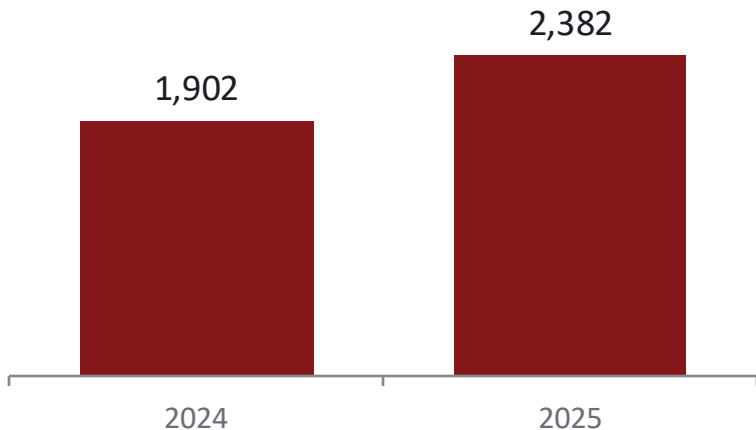
15 Okt 2026

Putusan MK 260: pidana umum prajurit ke peradilan umum

“Ketika pelakunya intelijen militer dan hakimnya juga militer, impunitas bukan kecelakaan. Ia dirancang.”

Represi di Ruang Digital

Kekerasan Berbasis Gender Online (SAFEnet)



Angka terbesar dalam tabel itu justru yang tidak dibicarakan: 821 kasus KBGO pada April–Juni 2026, dua dari tiga korbannya perempuan.

170 → 300+

pelanggaran kebebasan berekspresi digital, 2024 ke 2025

215

kasus di antaranya bermotif politik

“Pemicunya bisa berganti, tetapi infrastrukturnya permanen.”



Bahasa Pendengung di Mulut Negara



“Antek asing”

Kritik dibingkai sebagai kepentingan luar negeri



“Color revolution”

Demonstrasi dibaca sebagai skenario asing



Dari KSP ke Bakom

Ulta Levenia: Tenaga Ahli Utama KSP, kemudian deputy Badan Komunikasi Pemerintah

“Ini bukan pendengung yang menyusup ke negara. Ini negara yang berbicara dengan bahasa pendengung.”

Ketika kritik dibaca sebagai ancaman, warga diperlakukan sebagai musuh.

Lima Rekomendasi Struktural

Reformasi tidak bisa dititipkan kepada institusi yang menjadi sumber masalahnya.

1

Moratorium satuan teritorial baru

sampai penilaian ancaman dibuka dan dibahas terbuka di DPR

2

Revisi UU Peradilan Militer sesuai Putusan MK 260

tanpa menunggu tenggat dua tahun habis

3

Patuhi Putusan MK 114

cabut Perpol 10/2025

4

Mekanisme pengaduan independen

tindak lanjutnya wajib dibuka kepada DPR dan publik

5

Hentikan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap kritik

dan bangun protokol KBGO yang berpihak pada korban



**Indonesia tidak sedang tersesat.
Indonesia sedang diarahkan, dan
kompasnya makin jauh dari
tangan sipil dan konstitusi.**

Ini bukan kebencian. Ini kemarahan yang punya data.

Terima kasih
Jaleswari Pramodhawardani · Lab45